

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

COMPONENTS OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS

Dian Apriani Yalabi

Politeknik Saint Paul Sorong
diansorong01@gmail.com

Abstrak

Komponen laporan keuangan pemerintah daerah membahas tentang elemen-elemen atau pos-pos yang perlu diinformasikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Aturan mengenai penyajian elemen laporan keuangan juga bias merujuk pada standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Namun tidak berarti semua pos harus ada nilainya. Jika pos tertentu tidak memiliki angka, maka tidak perlu dipaksakan untuk diisi nilainya dan disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan dari artikel ini untuk memberikan gambaran terkait komponen laporan keuangan pemerintah daerah serta menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menilai akuntabilitas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang dikelola dalam mengambil keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik.

Kata kunci : Komponen, laporan keuangan

Abstract

The components of local government financial statements discuss the elements or items that need to be informed in local government financial statements. Rules regarding the presentation of financial statement elements can also refer to government accounting standards that have been set. But that doesn't mean all posts have to have value. If a particular item does not have numbers, then it does not need to be forced to fill in its value and be presented in the financial statements. The purpose of this article is to provide an overview of the components of local government financial statements and present useful information for decision making and assessing accountability, financial performance of a reporting entity managed in making decisions both economic, social, and political decisions.

Keywords: Components, financial statements

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, evaluasi efektifitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Agar bisa memahami Laporan keuangan pemerintah daerah, pembaca dan pengguna laporan perlu memahami elemen laporan keuangan. Perlu dilakukan pencermatan terhadap setiap elemen (pos) yang dilaporkan. Pencermatan yang dimaksud meliputi penelitian terhadap besaran nilai elemen yang dilaporkan, kebenaran nilai tersebut serta pengaruh

terhadap kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara meneliti setiap elemen untuk menghasilkan angka rasio keuangan, serta memprediksi kondisi dimasa mendatang.

2. DASAR TEORI / METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

2.1 Pengertian Laporan Keuangan Menurut Para Ahli

Menurut Raymond budiman (2021) Laporan keuangan dokumen yang menggambarkan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu.

Menurut kasmir (2019) Laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau waktu tertentu.

2.2 Jenis- jenis laporan keuangan

1. Neraca
2. Laporan laporan operasional
3. Laporan realisasi anggaran
4. Laporan arus kas
5. Laporan perubahan ekuitas
6. Laporan perubahan saldo anggaran
7. Catatan atas laporan keuangan

Dari bebarapa jenis laporan keuangan hanya di posting laporan keuangan utama saja seperti, neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Namun tidak menuup kemungkinan pemerintah daerah menyajikan kinerja keuangan secara lebih lengkap.

3. PEMBAHASAN

Tujuan dari Komponen Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang dikelola dan mengambil keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun poitik.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan infomasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran terdiri atas enam elemen utama , yaitu :

1. Pendapatan

Pendapatan di bagi menjadi tiga komponen :

- Pendapatan asli daerah
- Pendapatan transfer
- Lain-lain pendaptan yang sah

2. Belanja
Belanja dibagi menjadi tiga yaitu:
 - Belanja operasi
 - Belanja modal
 - Belanja tak terduga
 3. Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang. Transfer pada dasarnya merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah.
 4. Surplus/defisit
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan deficit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.
 5. Pembiayaan
Dibagi menjadi dua yaitu :
 1. Penerimaan pembiayaan
 2. Pengeluaran pembiayaan
 6. Silpa/Sikpa
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran.
-
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya.
 3. Neraca
Neraca pemerintah daerah menyajikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam neraca terdapat beberapa komponen-komponen sebagai berikut :
 1. Aset
Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah dan dapat memberikan manfaat dan social di masa mendatang. Aset di bagi menjadi empat jenis yaitu :
 1. Aset lancar
Aset lancar merupakan kas dan setara kas yang digunakan dan tidak terikat dengan penggunaannya serta aset lainnya dan dapat diubah dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporannya. Aset lancar meliputi:
 - Kas dan setara kas
 - Investasi jangka pendek
 - Piutang
 - Persediaan

2. Investasi jangka panjang
Investasi jangka panjang meliputi:
 - Investasi nonpermanen
investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang memiliki secara tidak berkelanjutan.
 - Investasi permanen
Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimiliki secara berkelanjutan.
 3. Aset tetap
Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang aktif digunakan dalam kegiatan operasional atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi:
 - Tanah
 - Peralatan dan mesin
 - Gedung dan bangunan
 - Jala, irigasi, jaringan
 - Konstruksi dalam pengerjaan
 - Akumulasi penyusutan
 4. Aset lainnya
 - Tagihan penjualan angsuran
 - Tuntutan perbendaharaan
 - Tuntutan ganti rugi
 - Kemitraan dengan pihak ketiga
 - Aset tak berwujud
 - Aset lain-lain
2. Kewajiban
- Kewajiban memberikan informasi kepada pengguna keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka pendek meliputi
 - Uang transfer
 - Utang gaji kepada karyawan
 - Utang perhitungan pihak ketiga
 - Utang bank
 - Bagian lancar utang jangka panjang pemerintah pusat
 - Bagian lancar utang jangka panjang pemerintah daerah lainnya
 - Bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank
 - Bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank
 - Obligasi pemerintah daerah yang jatuh tempo
 - Bagian lancar utang jangka panjang lainnya
 - Utang jangka pendek lainnya

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang meliputi

- Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
- Utang jangka panjang kepada pemerintah daerah lainnya
- Utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank
- Obligasi pemerintah daerah
- Utang jangka panjang lainnya

3. Ekuitas

Berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintahan yang lama, yaitu PP No. 24 tahun 2005 diklasifikasi menjadi tiga, yaitu : 1. Ekuitas dana lancar, 2. Ekuitas dana investasi, dan 3. Ekuitas dana cadangan. Sedangkan standar akuntansi pemerintahan yang baru berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, akun ekuitas tidak dirincikan lagi dalam tiga jenis.

4. Laporan operasional

Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai semua kegiatan operasional. Laporan operasional terdiri atas tiga elemen yaitu:

1. Pendapatan lo

- Pendapatan asli daerah
- Pendapatan transfer
- Transfer pemerintah- pusat lainnya
- Transfer pemerintah pusat provinsi
- Lain-lain pendapatan yang sah

2. Beban (biaya)

- Beban pegawai
- Beban persediaan
- Beban jasa
- Beban pemeliharaan
- Beban perjalanan dinas
- Beban bunga
- Beban subsidi
- Beban hibah
- Beban bantuan social
- Beban penyusutan
- Beban transfer
- Beban lain-lain

3. Surplus /deficit dari kegiatan operasional

- Surplus/deficit dari kegiatan non;operasional
- Pos luar biasa
- Surplus defisit-lo

5. Laporan arus kas

Laporan yang memberikan informasi keluar masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas dibagi menjadi empat aktivitas utama, yaitu :

1. Arus kas dari aktivitas operasi
 2. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
 3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
 4. Arus kas dari aktivitas transitoris
6. Laporan perubahan ekuitas
Merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai peningkatan atau penurunan laba rugi selama satu periode.
7. Catatan atas laporan keuangan
Merupakan laporan yang memberikan informasi penjabar secara lebih rinci yang ada pada laporan keuangan baik elemen neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sal, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas. Tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan yaitu untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara pihak lain dengan penyaji, melengkapi informasi dalam laporan keuangan neraca, mengungkapkan informasi penting yang berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga menjadi transparansi dan akuntabilitas public.
Catatan atas laporan keuangan meliputi
- Kebijakan fiskal
 - Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - Kebijakan akuntansi keuangan daerah
 - Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk pemerintah daerah yang menggunakan basis akrual
 - Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

4. KESIMPULAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau waktu tertentu. Laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas yang baik pada para pengguna dan pembaca.

Analisis laporan keuangan harus mencermati laporan keuangan yang dikaitkan dengan keterangan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk memahami keuangan pemerintah daerah, pembaca dan pengguna laporan perlu memahami elemen laporan keuangan yang ada, seperti, neraca, laporan arus kas laporan operasional, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti. (2021). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- [2] Harahap, S. S. (2016). ANALISIS KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Hidayat, W. W. (2018). Dasar-Dasar Analisa Keuangan. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- [4] Belkouli, Ahmad Riahi. 2001. Teori Akuntansi. Terjemahan Marwata et. al. Salemba Empat.